

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

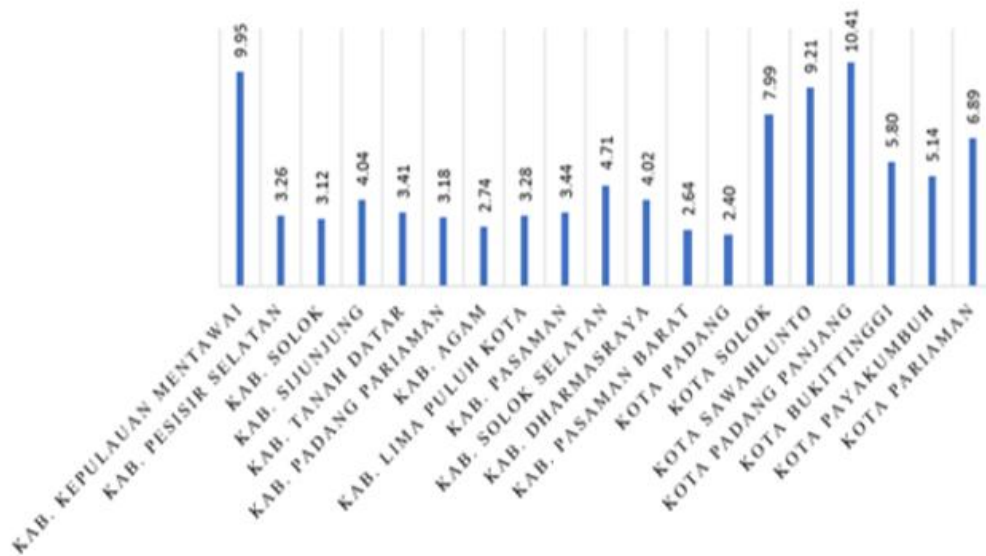
#### **4.1 Hasil**

##### **4.1.1 Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian**

Kajian ini mencakup wilayah di seluruh Sumatera Barat yang mencakup 19 kabupaten/ kota. Secara geografis, provinsi ini berada di pesisir barat Pulau Sumatera dan secara administratif memiliki ibu kota di Kota Padang. Wilayah ini memiliki luas sekitar 42.297,30 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 5,64 juta jiwa (BPS Sumbar, 2024). Dari sisi ekonomi, karakteristik tiap daerah cukup bervariasi, sebagian besar kabupaten bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan, sedangkan kota-kota lebih fokus pada sektor jasa, perdagangan, dan administrasi pemerintahan.

Pemilihan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kecenderungan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terutama melalui DAU, DAK, dan DBH tahun 2017 hingga 2024 (DJPK, 2023). Berdasarkan data keuangan pemerintah daerah, porsi dana transfer pusat terhadap total pendapatan daerah di sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat masih sangat dominan, dengan kontribusi rata-rata mencapai lebih dari 70% sepanjang tahun 2017 hingga 2022, yang berarti bahwa belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat masih bergantung kepada dana pusat (DJPK, 2023). Kondisi ini menjadi alasan penting mengapa penelitian mengenai *flypaper effect* dan kaitannya dengan kemandirian fiskal perlu dilakukan di Sumatera Barat.

Untuk memperjelas kondisi ini, berikut disajikan mengenai belanja perkapita pemerintah daerah, yang dapat dijadikan sebagai gambaran awal untuk mengetahui intensitas pengeluaran pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat.



Gambar 4.1 Grafik Rata-Rata Belanja Daerah Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2024 (dalam juta rupiah)

*Sumber: Data Diolah, 2026*

Berdasarkan perhitungan rata-rata total belanja daerah per kapita tahun 2017-2024, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan yang cukup jelas antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Total belanja daerah per kapita mencerminkan besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk setiap penduduk, sehingga indikator ini tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya total APBD, tetapi juga oleh jumlah penduduk serta karakteristik geografis dan fungsi wilayah. Oleh karena itu, daerah dengan jumlah penduduk relatif kecil dapat memiliki belanja per kapita yang tinggi meskipun total belanja daerahnya tidak besar secara absolut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang memiliki total belanja per kapita tertinggi dibandingkan wilayah lainnya yaitu sebesar 10,41 juta rupiah. Selain itu, Kota Sawahlunto dan Kota Solok juga menunjukkan tingkat belanja perkapita yang relatif tinggi. Kondisi ini berkaitan dengan peran kota sebagai pusat pelayanan publik, ekonomi, dan administrasi yang melayani tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga masyarakat dari daerah sekitarnya. Dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten, belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan,

kesehatan, dan layanan publik lainnya menjadi lebih besar secara per kapita. Fenomena ini menunjukkan adanya efek limpahan pelayanan, dimana manfaat belanja daerah kota dinikmati oleh wilayah di sekitarnya. Hal ini berbeda dengan Kota Padang, Dimana meskipun berstatus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan pusat pemerintahan serta aktivitas ekonomi, justru menunjukkan total belanja daerah per kapita yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten dan kota lainnya yaitu hanya sebesar 2,40 juta. Kondisi ini terutama disebabkan oleh faktor demografis dan karakter fungsi wilayah. Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Sumatera Barat, sehingga total belanja daerah yang cukup besar harus dibagi ke jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain. Akibatnya, secara matematis dan fiskal, nilai belanja per kapita menjadi lebih rendah meskipun kapasitas fiskal Kota Padang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki total belanja per kapita tertinggi kedua setelah Kota Padang Panjang, yaitu sekitar 9,95 juta rupiah. Tingginya belanja per kapita di Mentawai tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan serta jumlah penduduk yang relatif sedikit. Dimana karakteristik ini menyebabkan biaya penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih mahal per penduduk, terutama terkait dengan biaya transportasi, logistik, dan pembangunan sarana dasar. Sehingga, belanja per kapita yang tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih mencerminkan tingginya biaya struktural pembangunan dan pelayanan publik, bukan semata-mata tingginya kapasitas fiskal daerah.

Sebaliknya, sebagian besar kabupaten di wilayah daratan menunjukkan tingkat belanja daerah per kapita yang relatif lebih rendah. Kabupaten seperti Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan kapasitas fiskal yang terbatas, sehingga belanja pemerintah daerah harus dibagi kepada lebih banyak penduduk. Kondisi ini menyebabkan belanja per kapita menjadi lebih rendah meskipun kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap tinggi. Selain itu, keterbatasan

Pendapatan Asli Daerah juga membuat kemampuan fiskal kabupaten-kabupaten tersebut sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

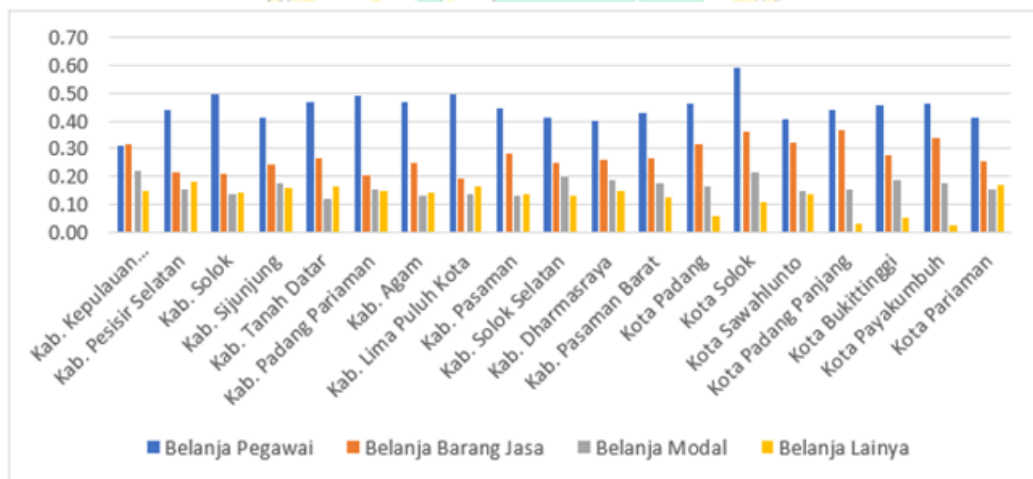
Secara keseluruhan, perbedaan total belanja daerah per kapita antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa besarnya belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah belum tentu mencerminkan efektivitas maupun kemandirian fiskal. Tingginya belanja per kapita di beberapa daerah lebih dipengaruhi oleh faktor demografis, geografis, dan fungsi wilayah, serta masih kuatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Ketergantungan fiskal yang masih tinggi di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga tidak dapat dilepaskan dari komposisi belanja daerah itu sendiri. Secara umum, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sementara proporsi belanja modal relatif lebih kecil. Dominasi belanja pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, seperti gaji dan tunjangan aparatur, yang bersifat jangka pendek dan kurang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi daerah.

Proporsi belanja modal yang rendah ini memiliki implikasi terhadap kemandirian fiskal. Belanja modal berperan dalam penyediaan infrastruktur dan aset produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas basis pajak daerah. Ketika belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja pegawai, kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru menjadi terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak berkembang secara optimal dan Pendapatan Asli Daerah sulit meningkat secara signifikan.

Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja pegawai yang tinggi bersifat kaku dan sulit dikurangi, sehingga setiap peningkatan dana transfer cenderung langsung dialokasikan untuk mempertahankan belanja rutin. Pola ini menyebabkan belanja daerah kurang responsif terhadap peningkatan kemandirian fiskal dan lebih mencerminkan perilaku *flypaper effect*, dimana dana transfer lebih cepat terserap untuk belanja rutin dibandingkan mendorong belanja pembangunan yang produktif.

Dengan demikian, struktur belanja daerah yang masih timpang antara belanja pegawai dan belanja modal menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa secara keseluruhan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat masih bergantung pada pemerintah pusat. Selama belanja daerah lebih berorientasi pada pembiayaan aparatur dibandingkan investasi pembangunan, maka peran APBD sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah akan tetap terbatas. Hampir seluruh kabupaten dan kota menunjukkan proporsi belanja pegawai yang relatif tinggi, umumnya berada di atas 40 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa APBD di sebagian besar daerah masih difokuskan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, khususnya gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Dominasi belanja pegawai ini mencerminkan kuatnya pengaruh belanja wajib dalam struktur fiskal daerah, terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.



Gambar 4.2 Grafik Rata-Rata Per Jenis Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2024 (dalam miliar rupiah)

Sumber: *Data Diolah, 2026*

Proporsi belanja pegawai yang sangat tinggi terlihat pada beberapa daerah seperti Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman. Kota Solok, misalnya, memiliki proporsi belanja pegawai mencapai sekitar 59 persen, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota yang

diamati. Tingginya belanja pegawai di Kota Solok dapat dijelaskan oleh karakteristik wilayahnya sebagai kota kecil dengan luas wilayah terbatas dan aktivitas pembangunan fisik yang relatif minim. Meskipun skala wilayah dan jumlah penduduknya kecil, struktur organisasi pemerintahan tetap harus dipenuhi secara utuh, sehingga kebutuhan pembiayaan aparatur menjadi dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak selalu mencerminkan besarnya aktivitas pembangunan, melainkan lebih pada kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Pada tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok, tingginya belanja pegawai juga berkaitan dengan luas wilayah administrasi dan kebutuhan pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat nagari. Jumlah aparatur yang relatif besar diperlukan untuk menjangkau wilayah yang luas dan heterogen, sehingga belanja pegawai menjadi komponen utama dalam APBD. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang belum kuat cenderung memprioritaskan belanja rutin untuk menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan dibandingkan mendorong belanja pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Berbeda dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa cenderung memiliki proporsi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan. Namun demikian, terdapat pengecualian penting yang perlu diperhatikan, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang juga menunjukkan proporsi belanja barang dan jasa yang relatif tinggi meskipun bukan wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya belanja barang dan jasa tidak selalu disebabkan oleh intensitas aktivitas ekonomi atau kompleksitas layanan perkotaan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor struktural wilayah.

Tingginya belanja barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama berkaitan dengan karakteristik geografis wilayah yang berupa kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan hampir seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik memerlukan biaya operasional yang lebih besar, terutama untuk transportasi, distribusi logistik, perjalanan dinas, serta pengadaan barang dan jasa untuk mendukung layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Biaya-biaya ini

bersifat berulang dan tidak dapat dihindari, sehingga mendorong peningkatan belanja barang dan jasa meskipun jumlah penduduk relatif kecil.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga membuat pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan belanja barang dan jasa dibandingkan belanja modal. Dalam kondisi dimana pembangunan infrastruktur fisik menghadapi kendala geografis dan biaya yang tinggi, belanja operasional menjadi pilihan utama untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Dengan demikian, belanja barang dan jasa di Mentawai lebih mencerminkan tingginya biaya struktural pelayanan publik akibat kondisi wilayah, bukan tingginya aktivitas ekonomi sebagaimana yang terjadi di wilayah perkotaan. Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang menunjukkan proporsi belanja barang dan jasa yang relatif besar dibandingkan sebagian besar kabupaten. Tingginya belanja barang dan jasa di wilayah kota mencerminkan peran kota sebagai pusat aktivitas pelayanan publik dan ekonomi. Kota-kota tersebut berfungsi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta jasa pemerintahan, sehingga membutuhkan anggaran operasional yang besar untuk mendukung kegiatan sehari-hari, seperti pengadaan barang, jasa layanan publik, serta biaya operasional fasilitas umum.

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi menunjukkan proporsi belanja barang dan jasa yang cukup tinggi, sejalan dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Sumatera Barat. Intensitas pelayanan publik yang tinggi menuntut pengeluaran operasional yang besar, sehingga belanja barang dan jasa menjadi salah satu komponen penting dalam struktur belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja barang dan jasa tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat mencerminkan tingginya aktivitas pelayanan dan fungsi ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan pola yang relatif berbeda dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya memiliki proporsi belanja modal yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya belanja modal di Kabupaten Kepulauan

Mentawai, misalnya, dapat dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan dan relatif tertinggal dari sisi infrastruktur. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada belanja modal.

Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya juga menunjukkan kecenderungan belanja modal yang cukup besar, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan fisik dan meningkatkan konektivitas wilayah. Daerah-daerah ini umumnya memiliki wilayah yang luas dan tingkat pembangunan yang belum merata, sehingga belanja modal menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, belanja modal dapat dipandang sebagai refleksi dari strategi pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah lain yang lebih maju.

Secara keseluruhan, perbedaan struktur belanja antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa alokasi APBD tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga oleh karakteristik wilayah, kapasitas fiskal, serta fungsi ekonomi dan administratif daerah tersebut. Dominasi belanja pegawai mencerminkan masih kuatnya orientasi administratif dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara variasi belanja barang dan jasa serta belanja modal menunjukkan perbedaan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan antar wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun desentralisasi fiskal telah berjalan, tantangan utama pemerintah daerah masih terletak pada upaya menyeimbangkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan agar APBD dapat berfungsi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja pegawai juga memiliki implikasi terhadap efektivitas belanja daerah dan potensi munculnya fenomena *flypaper effect*, dimana dana transfer dari pemerintah pusat cenderung lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin dibandingkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam konteks *flypaper effect*, dominasi belanja pegawai di banyak kabupaten dan kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa tambahan dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum, belum sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan belanja pembangunan yang bersifat produktif. Sebaliknya, dana tersebut lebih cepat menempel pada belanja yang bersifat wajib dan sulit dikurangi, terutama belanja pegawai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa respons belanja daerah terhadap dana transfer lebih kuat dibandingkan respons terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang seharusnya menjadi indikator meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

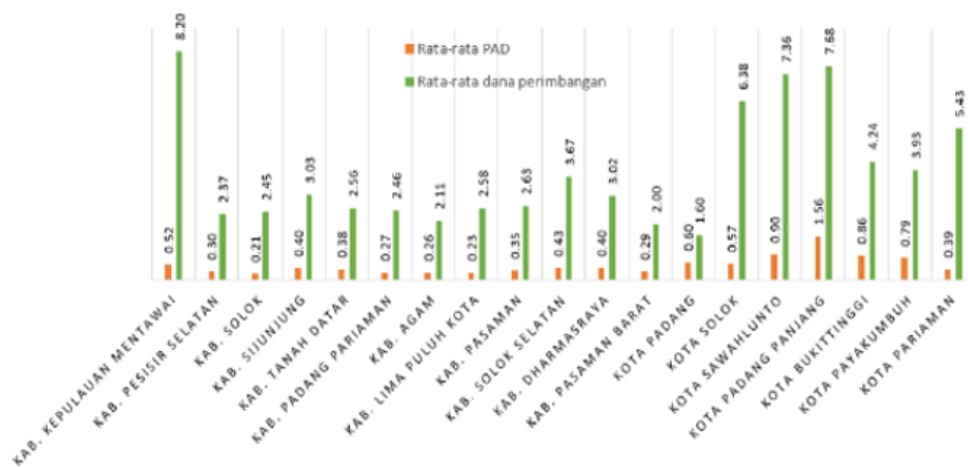
Perbedaan struktur belanja antara kabupaten dan kota juga memperkuat argumentasi bahwa *flypaper effect* tidak terjadi secara seragam di seluruh daerah, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Kabupaten dengan wilayah luas dan tingkat pembangunan yang relatif tertinggal, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya, cenderung mengalokasikan belanja modal yang lebih besar sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, besarnya belanja modal tersebut masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah tersebut tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal meningkat, sumber pembiayaannya belum sepenuhnya berasal dari kemampuan fiskal daerah sendiri.

Sebaliknya, wilayah perkotaan seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang menunjukkan struktur belanja yang lebih terkonsentrasi pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan tingginya aktivitas pelayanan publik dan operasional pemerintahan, namun sekaligus menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk belanja modal. Dalam jangka panjang, struktur belanja yang terlalu berorientasi pada belanja rutin berpotensi menghambat upaya peningkatan kapasitas ekonomi daerah, karena investasi pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan aset produktif relatif terbatas.

Dari sisi efektivitas dan efisiensi belanja daerah, struktur belanja yang diamati menunjukkan adanya trade-off antara pemenuhan kebutuhan administratif dan pencapaian tujuan pembangunan. Daerah dengan belanja pegawai yang sangat tinggi menghadapi risiko rendahnya efisiensi belanja, karena porsi anggaran yang

dapat dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin terbatas. Sementara itu, daerah yang mampu menjaga proporsi belanja modal pada tingkat yang relatif lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong pembangunan jangka panjang, meskipun tetap menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas fiskal.

Dengan demikian, analisis struktur belanja daerah ini memberikan gambaran bahwa variasi belanja antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan geografis, tetapi juga mencerminkan perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespons dana transfer. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memahami fenomena *flypaper effect* dan kemandirian fiskal daerah, serta menunjukkan bahwa perbaikan kualitas belanja daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga pada perubahan orientasi belanja menuju kegiatan yang lebih produktif dan berkelanjutan.



Gambar 4.3 Grafik Rata-Rata Total PAD dan Dana Perimbangan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2024 (dalam juta rupiah)

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Gambar 4.3 mengenai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017–2024, terlihat adanya perbedaan karakteristik fiskal yang cukup jelas antar daerah. Secara umum, seluruh kabupaten/kota masih menunjukkan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dana perimbangan

dibandingkan dengan kemampuan PAD per kapita yang dimiliki. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah di Sumatera Barat belum sepenuhnya ditopang oleh sumber-sumber pendapatan asli daerah, melainkan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai, misalnya, menunjukkan dana perimbangan per kapita yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 8,20 juta rupiah, sementara PAD per kapitanya relatif rendah yaitu 0,52 juta rupiah. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik wilayah Mentawai sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan basis ekonomi yang sempit. Aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer dan jasa tradisional menyebabkan potensi pajak dan retribusi daerah belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Akibatnya, upaya pembiayaan pembangunan daerah lebih banyak bergantung pada dana perimbangan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik.

Kabupaten-kabupaten lain seperti Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat juga memperlihatkan pola yang relatif serupa, di mana dana perimbangan per kapita secara konsisten lebih besar dibandingkan PAD per kapita. Meskipun terdapat variasi antar daerah, rendahnya PAD per kapita pada kabupaten-kabupaten tersebut umumnya berkaitan dengan struktur perekonomian yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi skala kecil, sehingga ruang fiskal yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing kabupaten dalam meningkatkan PAD masih sangat dipengaruhi oleh keterbatasan basis ekonomi lokal.

Berbeda dengan kabupaten, kota-kota di Provinsi Sumatera Barat seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman cenderung memiliki PAD per kapita yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi, aktivitas ekonomi yang lebih beragam, serta basis pajak dan retribusi yang relatif lebih luas. Namun demikian,

meskipun PAD per kapita di wilayah kota lebih besar dibandingkan kabupaten, dana perimbangan per kapita masih tetap mendominasi struktur pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kemandirian fiskal daerah di Sumatera Barat, termasuk wilayah perkotaan, masih belum sepenuhnya kuat.

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi menarik untuk dicermati lebih lanjut. Meskipun memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, PAD per kapita Kota Padang relatif tidak setinggi beberapa kota lain. Hal ini dapat dijelaskan oleh jumlah penduduk Kota Padang yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain, sehingga PAD yang secara absolut cukup besar menjadi relatif lebih kecil ketika dihitung dalam satuan per kapita. Dengan kata lain, tingginya jumlah penduduk menyebabkan beban pembiayaan pelayanan publik meningkat, sehingga nilai PAD per kapita menjadi lebih rendah dibandingkan kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih kecil.

Secara keseluruhan, gambaran rata-rata PAD dan dana perimbangan per kapita ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya didukung oleh penguatan sumber-sumber PAD. Kondisi ini selanjutnya berimplikasi pada pola pengelolaan belanja daerah. Daerah dengan keterbatasan PAD cenderung mengalokasikan belanja pada pos-pos rutin, khususnya belanja pegawai, dibandingkan belanja yang bersifat produktif.

Fenomena ini memiliki implikasi penting dalam konteks *flypaper effect*. Teori *flypaper effect* menjelaskan bahwa dana transfer dari pusat cenderung langsung “menempel” pada belanja daerah, sehingga peningkatan dana transfer biasanya diikuti dengan peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan ketika terjadi peningkatan PAD. Kondisi kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki dominasi transfer pusat dalam struktur pendapatan menjadikan penelitian ini relevan, karena diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya fenomena *flypaper effect* serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah.

Secara keseluruhan, deskripsi lokasi penelitian ini memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan contoh yang tepat untuk mengkaji fenomena *flypaper effect*. Variasi antar daerah, baik dalam hal kapasitas fiskal maupun struktur APBD, dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hubungan antara dana transfer, PAD, belanja daerah, dan kemandirian fiskal.

#### 4.1.2 Hasil Dan Interpretasi Analisis Data

##### 4.1.2.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dapat memberikan gambaran variabel-variabel yang digunakan, berupa jumlah, rata-rata, nilai tertinggi dan terendah, serta penyebaran datanya melalui standar deviasi. Berikut adalah tabel deskripsi variabel yang digunakan:



Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

| Variabel     | Obs | Mean | Std. Dev. | Min  | Max   |
|--------------|-----|------|-----------|------|-------|
| belanjaper~a | 152 | 5.03 | 2.57      | 2.24 | 11.61 |
| Kf           | 152 | .11  | .05       | .04  | .29   |
| padperkapita | 152 | .51  | .33       | .17  | 1.75  |
| dauperkapita | 152 | 2.99 | 1.75      | 1.14 | 7.27  |
| dbhkapita    | 152 | .12  | .11       | .02  | .67   |
| dakperkapita | 152 | .77  | .30       | .21  | 1.98  |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan statistik deskriptif, terlihat bahwa rata-rata belanja daerah per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan mencapai sekitar 5,03 juta rupiah per penduduk per tahun, dengan nilai minimum sebesar 2,24 juta rupiah dan maksimum mencapai 11,61 juta rupiah. Rentang yang cukup panjang ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, dimana beberapa daerah mampu menyediakan belanja publik yang relatif besar bagi setiap penduduknya, sementara sebagian daerah lainnya masih berada pada tingkat belanja per kapita yang relatif rendah. Nilai standar deviasi sebesar 2,57 mengindikasikan variasi yang cukup tinggi antar kabupaten/kota, sehingga perbedaan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, serta kapasitas fiskal daerah sangat mempengaruhi besaran belanja yang dapat dialokasikan per kapita.

Dari sisi kemandirian fiskal, nilai rata-rata rasio kemandirian fiskal (Kf) sebesar 0,11 dengan nilai maksimum hanya mencapai 0,29 menunjukkan bahwa secara umum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih berada pada kategori kemandirian fiskal yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah masih sangat terbatas, dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih dominan. Rendahnya nilai minimum rasio kemandirian fiskal sebesar 0,04 semakin menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah yang hampir sepenuhnya bergantung pada dana transfer dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut sejalan dengan gambaran PAD per kapita yang secara rata-rata hanya sebesar 0,51 juta rupiah per penduduk, dengan nilai maksimum 1,75 juta rupiah. Angka ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total belanja per kapita, sehingga menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah masih terbatas. Rendahnya PAD per kapita mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal.

Sebaliknya, komponen dana transfer menunjukkan peranan yang sangat dominan. Rata-rata DAU per kapita mencapai 2,99 juta rupiah, jauh lebih besar dibandingkan PAD per kapita, dengan nilai maksimum mencapai 7,27 juta rupiah. Besarnya DAU per kapita ini mengindikasikan bahwa belanja daerah di Sumatera Barat pada umumnya masih sangat ditopang oleh alokasi dana dari pemerintah pusat. DBH per kapita memiliki nilai rata-rata yang relatif kecil, yakni sebesar 0,12 juta rupiah, sedangkan DAK per kapita rata-rata mencapai 0,77 juta rupiah. Meskipun DAK berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor tertentu, karakteristiknya yang bersifat spesifik dan terikat membuat dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal jangka panjang daerah menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, temuan statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa meskipun belanja daerah per kapita di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi, struktur pembiayaan belanja tersebut masih didominasi oleh dana transfer, terutama

DAU, dengan kontribusi PAD yang relatif kecil. Kondisi ini menjelaskan mengapa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Selain itu, tingginya belanja daerah belum tentu secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila alokasinya lebih banyak terserap pada belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Belanja pegawai yang tinggi cenderung bersifat rutin dan kurang memberikan efek pengganda yang kuat terhadap perekonomian daerah, sehingga tidak secara optimal mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan basis pajak daerah.

#### 4.1.2.2 Uji Pemilihan Model Terbaik

##### a. Persamaan 1

##### Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian, dimana dalam uji chow model yang diuji adalah *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka model yang terpilih untuk digunakan yaitu FEM. Sedangkan jika hasil signifikansi besar dari 0,05 maka model yang dipilih yaitu CEM.

Tabel 4.2 Uji Chow Persamaan 1

| Uji  | Cross- Section F | P-Value | Kesimpulan |
|------|------------------|---------|------------|
| Chow | 0.93             | 0.54    | CEM        |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji untuk model 1, dapat dilihat bahwa signifikansi efek individu menghasilkan nilai  $F = 0,93$  dengan probabilitas 0,54, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan efek tetap antar kabupaten/kota, sehingga model *common effect* lebih baik dibandingkan dengan FEM.

##### Uji Lagrange Multiplier

Dalam uji chow yang telah dilakukan untuk persamaan 1, maka diperoleh CEM sebagai model terbaik, sehingga diperlukan uji terakhir yaitu *lagrange multiplier* yang membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila nilai  $p\ value > 0,05$  maka model yang terbaik untuk

digunakan adalah CEM. Sebaliknya jika  $p\text{ value} < 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian adalah REM.

Tabel 4.3 Uji Langrange Multiplier Persamaan 1

| Uji     | chibar2 | Prob > chibar2 | Kesimpulan |
|---------|---------|----------------|------------|
| Hausman | 0.00    | 1.0000         | CEM        |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* persamaan pertama, diperoleh nilai  $\text{chibar}^2$  sebesar 0,00 dengan probabilitas 1,0000. Sehingga model yang paling tepat digunakan pada persamaan pertama untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah *Common Effect Model* (CEM).

#### b. Persamaan 2

##### Uji Chow



Tabel 4.4 Uji Chow Persamaan 2

| Uji  | Cross- Section F | P-Value | Kesimpulan |
|------|------------------|---------|------------|
| Chow | 62.68            | 0.000   | FEM        |

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji efek individu menghasilkan nilai  $F = 62,68$  dengan probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kabupaten/kota, sehingga model *fixed effect* lebih sesuai digunakan dibanding CEM. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik fiskal tiap daerah berbeda, sehingga kebijakan yang efektif di satu daerah belum tentu dapat diterapkan secara sama di daerah lain.

##### Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji chow untuk persamaan 2, diperoleh FEM sebagai model terbaik. Sehingga dilakukan pengujian berikutnya yaitu uji hausman memutuskan model manakah yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian. Yang mana pada uji ini akan membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), jika nilai dari  $p\text{ value} > 0,05$  maka REM dipilih

sebagai model terbaik untuk yang akan digunakan, dan sebaliknya jika nilai *p value* < dari 0,05 FEM adalah model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.5 Uji Hausman Persamaan 2

| Uji     | chi2  | Prob>chi2 | Kesimpulan |
|---------|-------|-----------|------------|
| Hausman | 62.68 | 0.000     | FEM        |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa probabilitas  $\chi^2$  0,000 yang berarti model random effect ditolak karena tidak hasil uji hausman menunjukkan bahwa pada persamaan kedua menunjukkan nilai  $\chi^2$  sebesar 62,68 dengan probabilitas 0,000 sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini menandakan bahwasanya dalam persamaan kedua yang digunakan untuk menganalisis *flypaper effect* terhadap kemandirian fiskal terdapat pengaruh karakteristik individu (dalam hal ini kabupaten/kota) yang bersifat unik dan tidak dapat ditangkap oleh model *Random Effect*. Oleh karena itu, penggunaan FEM lebih mampu memberikan estimasi yang konsisten dan akurat dibandingkan dengan REM.

#### 4.1.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### Uji Multikolinearitas

Dalam suatu penelitian kuantitatif, penting untuk memastikan suatu model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi apabila antar variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat mengganggu keakuratan estimasi koefisien regresi. Untuk mendeteksinya, digunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF).

Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila jika VIF masing-masing variabel kecil dari 10 atau nilai tolerance ( $1/VIF$ ) besar dari 0,1. Berikut hasil pengujian multikolinearitas pada kedua model yang digunakan:

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Persamaan 1 dan 2

| Variabel     | VIF  | 1/VIF |
|--------------|------|-------|
| dauperkapita | 4.95 | 0.20  |
| dakperkapita | 3.51 | 0.28  |
| padperkapita | 2.61 | 0.38  |
| dbhkapita    | 2.10 | 0.48  |
| Mean VIF     | 3.29 |       |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.6, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dengan nilai *tolerance* > 0,1. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Variabel-variabel independen yang digunakan dapat dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

#### Uji Heteroskedastisitas

Sebelum melakukan interpretasi hasil regresi, perlu dipastikan bahwa model tidak mengalami permasalahan autokorelasi. Oleh karena itu, pada bagian ini ditampilkan hasil uji autokorelasi agar dapat mengetahui terjadi atau tidaknya hubungan antara residual periode sekarang dengan periode sebelumnya.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

| Uji                 | chi2  | Prob>chi2 | Kesimpulan          |
|---------------------|-------|-----------|---------------------|
| Heteroskedastisitas | 75.14 | 0.0000    | Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada persamaan pertama, diperoleh nilai  $\chi^2$  sebesar 75,14 dengan probabilitas 0,0000. sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

| Uji                 | chi2   | Prob>chi2 | Kesimpulan          |
|---------------------|--------|-----------|---------------------|
| Heteroskedastisitas | 247.40 | 0.0000    | Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas untuk model analisis *flypaper effect* terhadap kemandirian fiskal, terdapat masalah heteroskedastisitas, sebab nilai probabilitas yang diperoleh berada dibawah tingkat signifikansi 0,05.

### Uji Autokorelasi

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi Persamaan 1

| Uji          | F     | Prob>F | Kesimpulan   |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Autokorelasi | 4.825 | 0.0414 | Autokorelasi |

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada uji autokorelasi untuk persamaan 1 menunjukkan bahwa probabilitas 0,0414 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0,05. Sehingga model pada persamaan pertama mengalami masalah autokorelasi.

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi Persamaan 2

| Uji          | F     | Prob>F | Kesimpulan   |
|--------------|-------|--------|--------------|
| Autokorelasi | 9.328 | 0.0068 | Autokorelasi |

SumberData Diolah, 2025

Hasil dari uji autokorelasi untuk analisis pengaruh *flypaper effect* terhadap kemandirian fiskal menunjukkan bahwa probabilitasnya kecil dari 0,05 sehingga model yang digunakan mengalami masalah autokorelasi.

Pada uji asumsi klasik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa model regresi yang digunakan dalam kajian ini mengalami dua pelanggaran asumsi penting, yaitu heteroskedastisitas serta autokorelasi. Untuk memastikan bahwa hasil estimasi tetap valid meskipun asumsi klasik dilanggar, penelitian ini menggunakan pendekatan *robust standard errors* khususnya estimasi yang robust terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi. Metode ini memungkinkan standar error yang diperoleh menjadi lebih reliabel, sehingga koefisien regresi dapat dievaluasi secara sah, dan uji-hipotesis yang dilakukan tetap memiliki dasar yang kuat meskipun kondisi data tidak ideal.

Pendekatan ini sejalan dengan literatur ekonomi dan ekonometrika. Sebagai contoh, dalam *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (Wooldridge, 2010), dibahas bahwa penggunaan standar error yang robust adalah cara yang umum dan direkomendasikan ketika terdapat indikasi pelanggaran asumsi klasik dalam regresi. Dengan dasar teori dari literatur tersebut, penggunaan *robust standard errors* dalam model ini dipandang sebagai solusi yang pantas dan tepat agar hasil regresi tetap aman untuk interpretasi dan kesimpulan, meskipun terdapat pelanggaran asumsi klasik.

Tabel 4.11 Hasil CEM Robust Persamaan 1

|                 |                  |                       |          |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| Number of obs   | 152              |                       |          |                 |
| Prob > F        | 0.0000           |                       |          |                 |
| R-squared       | 0.9894           |                       |          |                 |
| <b>Variabel</b> | <b>Koefisien</b> | <b>Robust Std. Er</b> | <b>t</b> | <b>P&gt; t </b> |
| padperkapita    | .71              | .13                   | 5.45     | 0.000           |
| dauperkapita    | 1.20             | .04                   | 31.93    | 0.000           |
| dbhkapita       | .93              | .37                   | 2.53     | 0.013           |
| dakperkapita    | .97              | .18                   | 5.28     | 0.000           |
| _cons           | .21              | .09                   | 2.31     | 0.022           |

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil estimasi menggunakan metode *Common Effect Model* (CEM) *robust* pada Persamaan 1 memperlihatkan bahwa variabel bebas yang digunakan, yaitu PAD per kapita, DAU per kapita, DBH per kapita, dan DAK per kapita, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah per kapita. Pada tabel 14 bisa dilihat bahwa nilai Prob > F sebesar 0,0000 yang berarti model regresi signifikan secara keseluruhan pada taraf 5 persen. Sementara itu, nilai *R-squared* sebesar 0,9894 mengindikasikan bahwa sekitar 98,94 persen variasi belanja daerah per kapita dapat dijelaskan oleh variasi pada PAD per kapita, DAU per kapita, DBH per kapita, dan DAK per kapita, sedangkan sisanya sebesar 1,06 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Model yang diperoleh dari hasil pengolahan data yaitu:

$$BD_{it} = 0.21 + 0.71PAD_{it} + 1.20DAU_{it} + 0.93DBH_{it} + 0.97DAK_{it} \dots \dots \dots (4.1)$$

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa PAD per kapita signifikan positif terhadap belanja daerah dengan koefisien sebesar 0,71. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD per kapita akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah per kapita, yang menggambarkan bahwa semakin tinggi suatu daerah mampu untuk menggali sumber pendapatan dari daerahnya sendiri, maka semakin besar pula kapasitas fiskal untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Selanjutnya, DAU per kapita memiliki koefisien sebesar 1,20 dan signifikan pada taraf 5 persen. Nilai koefisien ini merupakan yang terbesar di antara variabel lain, sehingga DAU menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi belanja perkapita. Kondisi ini menjadi indikasi awal bahwa belanja daerah lebih banyak ditentukan oleh transfer pusat dibandingkan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD.

Jika dilakukan perbandingan, terlihat bahwa DAU memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan PAD. Secara proporsional, pengaruh DAU terhadap belanja daerah per kapita sekitar 1,7 juta sedangkan PAD per kapita hanya 1,20 juta. Perbedaan ini memperlihatkan adanya gejala *flypaper effect*, yakni kondisi ketika pengeluaran pemerintah di daerah lebih responsif terhadap dana yang di transfer oleh pusat dari pada oleh kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Dengan demikian, meskipun PAD berperan signifikan dalam mendorong peningkatan belanja daerah, besarnya pengaruh DAU menjelaskan bahwa ketergantungan daerah yang tinggi kepada pusat, sehingga belanja cenderung melekat pada dana dari pusat ketimbang bersumber dari penerimaan asli daerah.

Selain PAD dan DAU, variabel DBH per kapita juga berpengaruh positif dengan koefisien 0,93. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dari pemerintah pusat turut meningkatkan belanja daerah, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan DAU. Sementara itu, DAK per kapita memiliki koefisien positif sebesar 0,97, yang artinya bahwa alokasi khusus dari pusat untuk fungsi tertentu juga mendorong belanja daerah. Adapun konstanta sebesar 0,21 menjelaskan bahwa ketika semua variabel bebas konstan, belanja daerah per kapita tetap berada pada angka positif meskipun dalam jumlah kecil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh variabel, baik PAD maupun transfer pusat (DAU, DBH, dan DAK), berkontribusi positif dalam meningkatkan belanja daerah per kapita. Namun dominasi pengaruh DAU dibandingkan PAD memperkuat bukti terjadinya *flypaper effect* di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki potensi untuk memperbesar belanja melalui peningkatan PAD, pada kenyataannya pengeluaran di daerah banyak dipengaruhi oleh transfer fiskal yang diberikan pusat, terutama melalui mekanisme DAU yang memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan PAD.

Tabel 4.12 Hasil FEM Robust Persamaan 2

|                 |                  |                       |          |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| Number of obs   | 152              |                       |          |                 |
| Prob > F        | 0.0000           |                       |          |                 |
| R-squared       | 0.7114           |                       |          |                 |
| <b>Variabel</b> | <b>Koefisien</b> | <b>Robust Std. Er</b> | <b>t</b> | <b>P&gt; t </b> |
| padperkapita    | .182             | .027                  | 6.81     | 0.000           |
| dauperkapita    | -.016            | .002                  | -6.88    | 0.000           |
| dbhkapita       | -.004            | .012                  | -0.29    | 0.773           |
| dakperkapita    | -.019            | .009                  | -2.19    | 0.042           |
| _cons           | .076             | .011                  | 6.32     | 0.000           |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effects Model* (FEM) dengan *robust standard errors* pada diatas, probabilitas F sebesar 0,0000 yang artinya bahwa secara keseluruhan variabel independen signifikan mempengaruhi kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan nilai R-squared 0,7114 yang berarti sekitar 71,14 persen variasi dalam kemandirian fiskal bisa dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian, sementara 28,83 dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Secara parsial, PAD per kapita signifikan positif mempengaruhi kemandirian fiskal. Artinya, peningkatan PAD per kapita akan berdampak kepada peningkatan kemandirian fiskal. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, dimana semakin tinggi PAD yang dapat digali dan dikumpulkan oleh daerah yang

akan meningkatkan pendapatan daerah, maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Sebaliknya, DAU per kapita signifikan negatif mempengaruhi kemandirian fiskal dengan koefisien sebesar  $-0,016$ . Yang artinya bahwa ketika terjadi peningkatan DAU per kapita sebesar satu juta rupiah, maka akan menurunkan tingkat kemandirian fiskal sebesar  $0,016$  persen yang menandakan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat dalam bentuk DAU, justru semakin menurunkan tingkat kemandirian fiskal. Hasil ini merupakan indikasi bahwa fenomena *flypaper effect* berpengaruh terhadap penurunan kemandirian fiskal yang dilihat dari pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian fiskal.

Untuk variabel lainnya, DBH per kapita tidak signifikan dalam mempengaruhi kemandirian fiskal. Hal ini dikarenakan sifat DBH yang cenderung fluktuatif dan tergantung pada penerimaan pusat dari sumber daya alam atau pajak tertentu, sehingga kontribusinya terhadap kemandirian fiskal kurang stabil.

Temuan ini mempertegas bahwa PAD merupakan faktor pendorong utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal, sedangkan transfer dari pusat, terutama DAU dan DAK, justru memperlemah kemandirian fiskal daerah.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh PAD Per kapita Terhadap Belanja Daerah Per kapita Dan Kemandirian Fiskal**

Hasil dari estimasi model *Common Effect* dengan *robust standard error*, diperoleh bahwa PAD per kapita positif dan signifikan mempengaruhi belanja daerah per kapita dengan koefisien  $0,71$ . Hal ini menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan sebesar satu juta rupiah pada penerimaan PAD, maka akan berdampak pada peningkatan belanja daerah per kapita sebesar  $0,71$  juta rupiah dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini memperlihatkan bahwa PAD memiliki peranan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal di daerah. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik. Dalam konteks Sumatera Barat, kondisi ini terlihat dari variasi kapasitas PAD antar kabupaten/kota, di mana daerah dengan PAD relatif tinggi memiliki ruang fiskal

lebih besar untuk membiayai kebutuhan belanja dibandingkan daerah dengan PAD rendah.

Sementara itu, pada estimasi model *Fixed Effect* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa PAD per kapita juga signifikan positif mempengaruhi kemandirian fiskal dengan koefisien sebesar 0,182. Ketika terjadi peningkatan satu juta rupiah pada penerimaan PAD maka akan mendorong kenaikan rasio kemandirian fiskal sebesar 0,182 persen, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa PAD tidak hanya berdampak terhadap peningkatan belanja daerah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemandirian fiskal. Semakin besar peran PAD dalam struktur penerimaan daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat. Temuan ini sejalan dengan teori kemandirian fiskal yang menekankan pentingnya peranan PAD sebagai indikator utama kemandirian suatu daerah.

Secara empiris, temuan yang diperoleh juga sejalan dengan kajian yang dilakukan Septianingrum et al., (2025) yang menunjukkan bahwa PAD signifikan dalam mempengaruhi belanja daerah. Artinya, peningkatan PAD diikuti dengan meningkatnya belanja riil daerah. Pengeluaran yang berasal dari PAD memiliki arti penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan publik dengan dana yang berasal dari potensi lokal. Hal ini sekaligus mendukung peningkatan kemandirian fiskal, sebagaimana ditegaskan oleh Maharani & Haryanto (2025) dalam penelitian mereka bahwa PAD positif signifikan terhadap kemandirian fiskal. Semakin besar porsi belanja yang dibiayai dari PAD, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat juga semakin berkurang, yang berarti kapasitas fiskal daerah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

#### **4.2.2 Pengaruh DAU Per kapita Terhadap Belanja Daerah Per kapita Dan Kemandirian Fiskal**

Berdasarkan hasil estimasi model *Common Effect* dengan *robust standard error* (Tabel 12), diperoleh bahwa DAU signifikan positif dalam mempengaruhi belanja daerah per kapita dengan nilai koefisien 1,20. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan DAU per kapita sebesar satu juta rupiah, maka akan berdampak pada peningkatan belanja per kapita sebesar 1,20 juta rupiah

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Temuan ini menegaskan bahwa DAU memiliki peranan yang sangat dominan dalam membiayai belanja daerah. Besarnya pengaruh DAU dibandingkan PAD mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect*, terjadi ketika transfer dari pemerintah pusat lebih cepat mendorong belanja daerah dari pada kemampuan PAD sendiri. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik fiskal kabupaten/kota di Sumatera Barat yang pada umumnya masih sangat bergantung pada transfer pusat dalam membiayai pengeluaran daerah, terutama di daerah dengan basis PAD yang rendah.

Selanjutnya, hasil estimasi model *Fixed Effect* menggunakan *robust standard error* menunjukkan bahwa DAU per signifikan negatif terhadap kemandirian fiskal, dengan koefisien sebesar -0,016. Artinya, peningkatan DAU per kapita sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan rasio kemandirian fiskal sebesar 0,016 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini memperlihatkan bahwa meskipun DAU mampu mendorong belanja daerah, namun ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat justru melemahkan kemandirian fiskal daerah. Temuan yang diperoleh konsisten dengan pandangan bahwa dominasi transfer pusat dapat menimbulkan *fiscal illusion* (Pramudya & Anis, 2024), yaitu kondisi di mana pemerintah daerah merasa memiliki kapasitas fiskal yang besar, padahal sumber utamanya berasal dari pemerintah pusat, bukan dari upaya penggalan potensi PAD.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Fitrianti et al., (2025) bahwa peningkatan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), akan memberikan dampak yang signifikan terhadap belanja daerah, bahkan peningkatannya lebih besar dari pada PAD. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah masih sangat tergantung terhadap dana transfer pusat daripada potensi fiskalnya sendiri. sehingga memperkuat bukti adanya fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selaras dengan temuan tersebut, Maharani & Haryanto (2025) juga menunjukkan bahwa DAU memiliki dampak negatif terhadap kemandirian fiskal. Artinya, meskipun DAU mampu meningkatkan belanja daerah, ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer ini justru mengurangi kapasitas daerah untuk mandiri secara fiskal.

### 4.2.3 Pengaruh DBH Per kapita Terhadap Belanja Daerah Per kapita Dan Kemandirian Fiskal

Hasil estimasi model *Common Effect* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa DBH per kapita signifikan positif terhadap belanja daerah per kapita dengan koefisien sebesar 0,93. Artinya, ketika terjadi peningkatan DBH per kapita sebesar satu juta rupiah, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0,93 juta rupiah, dengan asumsi variabel konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa DBH juga menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja daerah, meskipun besarnya pengaruh masih lebih kecil dibandingkan DAU. Temuan ini konsisten dengan mekanisme DBH yang dialokasikan untuk daerah penghasil, sehingga kontribusinya terhadap belanja sangat tergantung pada kapasitas ekonomi daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, pada estimasi *Fixed Effect* dengan *robust standard error*, DBH per kapita tidak signifikan dalam mempengaruhi kemandirian fiskal. Hal ini berarti peningkatan DBH tidak serta-merta meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Kondisi ini dapat dijelaskan karena DBH pada dasarnya masih merupakan transfer dari pusat, sehingga meskipun meningkatkan penerimaan daerah, sifatnya tidak mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskal secara mandiri. Dengan kata lain, DBH lebih memperkuat belanja daerah ketimbang mendorong kemandirian fiskal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum et al., (2025) yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil signifikan positif terhadap belanja daerah, namun tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Artinya, DBH lebih mendorong peningkatan belanja ketimbang memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Hal ini konsisten dengan sifat DBH sebagai transfer dari pusat yang dialokasikan berdasarkan daerah penghasil, sehingga penerimaannya sangat bergantung pada kapasitas ekonomi daerah masing-masing. Sejalan dengan kajian Andriana (2020) yang menemukan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah, hal ini dikarenakan tingginya variabilitas jumlah DBH antar daerah. Dengan kata lain, meskipun DBH menjadi

salah satu sumber utama pembiayaan belanja, perannya dalam mendorong kemandirian fiskal relatif terbatas.

#### **4.2.4 Pengaruh DAK Per kapita Terhadap Belanja Daerah Per kapita Dan Kemandirian Fiskal**

Berdasarkan hasil estimasi model *Common Effect* dengan *robust standard error*, DAK per kapita signifikan positif terhadap belanja daerah per kapita dengan koefisien sebesar 0,97. Artinya, ketika DAK per kapita naik sebesar 1 juta rupiah akan terjadi peningkatan belanja daerah per kapita sebesar 0,97 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa DAK memang didesain untuk membiayai kegiatan tertentu di daerah, sehingga kontribusinya langsung terlihat pada peningkatan belanja publik. Temuan ini sejalan dengan tujuan utama DAK yang bersifat spesifik dan diarahkan untuk mendanai kegiatan pembangunan sesuai prioritas nasional di daerah.

Namun, hasil estimasi model *Fixed Effect* dengan *robust standard error* memperlihatkan variabel DAK per kapita negatif signifikan dalam terhadap kemandirian fiskal, dengan koefisien sebesar -0,019. Artinya, ketika DAK yang diterima suatu daerah mengalami peningkatan sebesar satu juta rupiah, maka kemandirian fiskal di daerah tersebut akan turun sebesar 0,019 persen, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun DAK dapat mendorong belanja daerah, namun tingginya ketergantungan pada transfer pusat dalam bentuk DAK berpotensi menekan kemandirian fiskal. Sehingga menunjukkan kondisi belanja daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, dan belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Somantri (2024) yang menemukan bahwa DAK signifikan positif terhadap belanja daerah serta kajian yang dilakukan oleh Maharani & Haryanto (2025) yang menemukan bahwa peningkatan dalam jumlah DAK di suatu daerah, berimplikasi terhadap penurunan kemandirian fiskalnya, karena akan memperkuat ketergantungan terhadap pusat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan temuan Andriana (2020) yang menyimpulkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus justru meningkatkan kemandirian daerah. Hal

ini disebabkan karena secara tidak langsung dalam jangka pendek dengan adanya peningkatan dari total DAK yang diterima, maka pemerintah daerah akan dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan PAD dan berdampak akhir kepada peningkatan kemandirian fiskal.

### **4.3 Implikasi Penelitian**

Setelah hasil penelitian dijelaskan dan dibandingkan dengan temuan sebelumnya, penting untuk menguraikan implikasi yang dapat ditarik. Implikasi ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menawarkan masukan praktis bagi perumusan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, implikasi metodologis juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif.

#### **4.3.1 Implikasi Teoritis**

Temuan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah dan kemandirian fiskal. Hal ini menguatkan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal lokal. Sementara itu, temuan yang menunjukkan bahwa DAU positif signifikan mempengaruhi belanja daerah namun negatif terhadap kemandirian fiskal mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect* di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Temuan ini memperkaya literatur tentang perilaku fiskal pemerintah daerah di Indonesia, khususnya bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih kuat meskipun PAD terus meningkat.

#### **4.3.2 Implikasi Praktis**

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih serius dalam mengoptimalkan sumber PAD agar kemandirian fiskal dapat ditingkatkan. Sementara transfer dana dari pusat seperti DAU, DBH, dan DAK tetap dibutuhkan, ketergantungan yang berlebihan berpotensi melemahkan kemandirian fiskal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat perlu memperkuat kebijakan pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengarahkan belanja daerah agar lebih produktif sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

### 4.3.3 Implikasi Metodologis

Dalam kajian ini digunakan regresi data panel dengan metode *robust* untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pendekatan ini menunjukkan hasil yang lebih konsisten mengenai hubungan PAD, DAU, DBH, dan DAK dengan belanja daerah serta kemandirian fiskal. Namun, penelitian ini terbatas pada variabel fiskal utama. Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh.

